

## DINAMIKA KONFLIK DAN PERDAMAIAN ACEH

Hany Nurpratiwi <sup>1</sup>, Hanny

<sup>1</sup> Tadris IPS FTIK IAIN Tulungagung. E-mail: hany.nurpratiwi13@gmail.com

### ARTICLE INFO

**Keywords:**

Aceh, Islam, conflict, government.

**How to cite:**

Hany Nurpratiwi, M.Pd.  
Dinamika Konflik Dan Perdamaian Aceh.  
Jambura, History and Culture Journal, 1(2), 96-107

**DOI:**

### ABSTRACT

The roots of the conflict in Aceh have been seen since the days of the feudal. Conflicts in Aceh not only occur with the central government, but Aceh has internal conflicts within the government. The reign of Sultan Iskandar Muda has divided the Aceh region into two groups, Uleebalang and Ulama. Allegedly the two groups already have a relationship that is not harmonious. Entering the period of Indonesian independence, the conflict in Aceh could not be resolved despite several peace compromise actions. Aceh's internal conflicts during independence occurred between Islamic groups and secular groups related to the Aceh government system. In addition to these internal conflicts, Aceh also has conflicts with the central government. The Acehnese feel that the central government is not paying attention to their well-being, causing a lot of poverty. Efforts to resolve conflicts in Aceh with the central government have been carried out by granting regional autonomy and political autonomy to the Special Region of Aceh.

Copyright © 2019 JHCJ. All rights reserved.

### 1. Pendahuluan

Melihat sejarahnya peristiwa-peristiwa yang terjadi di Aceh sebenarnya disebabkan oleh pertarungan dua arus besar pemikiran yang sangat menonjol. Pemikiran tersebut adalah yang berdasarkan agama (Islam) dan sekuler atau non-agama.<sup>1</sup> Dengan adanya perbedaan tersebut menyebabkan masyarakat menjadi menggolongkan sesuai dengan yang mereka ikuti. Dari sudut pandang politik pasca kemerdekaan melahirkan kekuatan besar yaitu para ulama yang tergabung dalam

<sup>1</sup>Pengantar Nazaruddin Sjamsuddin, dalam MR. S.M. Amin. *Memahami Sejarah Konflik Aceh*. 2014. Jakarta: Obor, hlm. xviii.

PUSA dan ulebalang.<sup>2</sup> Pertentangan tersebut tidak bisa menghindarkan terjadinya konflik di Aceh.

Buntut panjang kekecewaan rakyat Aceh terhadap pemerintah pusat karena masyarakat Aceh merasa tidak mendapatkan porsi yang semestinya. Aceh telah beberapa kali memberikan bantuan kepada pemerintah Indonesia, seperti pada saat Indonesia menyambut kemerdekaan yang ke-3 Aceh memberikan bantuan dua pesawat terbang, tahun 1949 rakyat Aceh memberikan sumbangan uang kontan 250.000 dolar AS kepada angkatan perang RI dan 250.000 dolar AS untuk keperluan pemerintah Sukarno.<sup>3</sup> Dapat kita pahami bagaimana usaha rakyat Aceh dalam melahirkan Republik Indonesia, namun di masa Orde Baru bumi Aceh dijadikan sapi perah dan kemiskinan yang terjadi di wilayah Aceh masih diabaikan.

Konflik yang terjadi di Aceh tidak hanya disebabkan oleh pertentangan kekuatan politik yang terpecah antara kaum agamis dan sekuler. Tetapi kekecewaan rakyat Aceh terhadap pemerintah pusat juga dikarenakan tidak adanya perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat Aceh yang berujung pada kemiskinan. Pemerintah pusat yang tidak menanggapi kekecewaan rakyat Aceh menyebabkan terjadinya pemberontakan mulai dari DI/TII yang dipimpin oleh Daud Beureuh dan GAM yang di pimpin oleh Hasan Tiro.

Setelah kita memahami akar konflik yang terjadi dalam masyarakat Aceh, hal yang tidak kalah penting adalah menemukan jalan keluar yang tepat untuk menyelesaikan konflik Aceh yang berkepanjangan.

## **2. Data Historis Terkait Akar-akar Konflik dan Perdamaian Aceh**

Sejak zaman kerajaan, Aceh telah mengaitkan agama dan patriotisme. Masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda merupakan masa keemasan, karena Aceh mampu melakukan perluasan wilayah, memegang kendali atas pelabuhan-pelabuhan penting dan menundukan para pedagang asing terhadap kekuasaan raja. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda wilayah kekuasaan Aceh mencapai pesisir barta

---

<sup>2</sup>Ulebalang adalah bangsawan yang pada masa pendudukan Belanda sangat dekat dan mendukung kebijakan Belanda, maka setelah kemerdekaan kekuatan para ulebalang pun tidak bisa menaandingi PUSaA sebagai kekuatan politik yang dominan sejak 1945-1949.

<sup>3</sup>Lihat pengantar, Neta S. Pane. *Sejarah dan Kekuatan Gerakan Aceh Merdeka*. 2001. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm v.

Minangkabau. Di bawah Sultan Iskandar Muda (1607-1636) wilayah administrasi Aceh dibagi menjadi dua golongan, yaitu uleebalang dan mukim.<sup>4</sup>

Uleebalang dan mukim (golongan ulama) sudah sejak lama memiliki hubungan yang tidak harmonis, mereka saling bertentangan. Pertentangan yang terkesan tidak dapat diselesaikan dengan jalur damai ini terjadi antara perbedaan adat dan hukum Islam.<sup>5</sup> Raja sebagai *adathoofd* mempertahankan kekuasaan adat, sedangkan ulama yang hanya sebagian kecil menduduki jabatan dalam pemerintahan sebagai hakim berusaha menghapuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan adat dan menggantikannya dengan peraturan-peraturan yang berbau Islam.

Setelah Iskandar Muda wafat, Aceh dipimpin oleh raja-raja perempuan. Wilayah Aceh semakin menciut, kekuasaan raja hanya sekitar wilayah pelabuhan dan ibukota.<sup>6</sup> Tidak kuatnya sultan yang memimpin Aceh setelah sultan Iskandar Muda menyebabkan para Uleebalang dapat mengambil keputusan tanpa persetujuan raja.

Pada abad 16, Ratu Inggris memerintahkan utusannya untuk meminta izin berdagang kepada kerajaan Aceh. Hubungan baik yang dijalin kerajaan Aceh juga dilakukan dengan Turki, Amerika Serikat dan Singapura terutama ketika meminta bantuan menghadapi Belanda.<sup>7</sup>

Keadaan dan situasi wilayah Aceh pasca kemerdekaan belum stabil, masih terdapat berbagai ketegangan dan perdebatan antara kaum nasionalis, sekuler dan Islam. Sejak masa pemerintahan yang berlangsung dari proklamasi kemerdekaan 1945 sampai penyerahan kedaulatan 1949 terjadi empat pergantian pemimpin di Aceh.

Daud Beureuh adalah tokoh Aceh yang mendukung kemerdekaan Indonesia dari Belanda. Dukungan Daud Beureuh tersebut akhirnya pada masa setelah kemerdekaan meminta pemerintah pusat untuk menyelenggarakan syariat Islam dan otonomi pemerintah di Aceh. Hal tersebut telah disepakati oleh Sukarno. Kenyataannya setelah Indonesia merdeka Aceh bergabung dengan wilayah Sumatra Utara. Kekecewaan timbul dari Daud Beureuh dan menyebabkan pemberontakan DI/TII Aceh yang sebelumnya telah terjadi di Jawa Barat dibawah Karto Suwiryo. Pemberontakan DI/TII Aceh berhenti pada 25 Mei 1959 dengan keberhasilannya Aceh

---

<sup>4</sup> Anthony Reid. *Asal Mula Konflik Aceh*. 2007. Jakarta: Obor, hlm 3.

<sup>5</sup> MR. S.M. Amin. *Memahami Sejarah Konflik Aceh*. 2013. Jakarta: Obor, hlm. 7.

<sup>6</sup> Anthony Reid, *Opcit.*, hlm 4.

<sup>7</sup><http://m.kompaasiana.com/dewis/aceh-di-masa-lalu-hingga-masakini5510b63ba333117732ba8d1d>, Diakses 3 Mei 2016, pukul 10.23 WIB

diberikan status Daerah Istimewa yang memiliki otonomi dibidang adat, agama dan pendidikan.

Keinginan rakyat Aceh untuk ditegakan syariat Islam di wilayahnya tidak mudah ditawarkan. Jika kita melihat latar belakang historisnya Aceh melahirkan kerajaan-kerajaan Islam mulai dari Samudra Pasai hingga kerajaan Aceh Darussalam. Kekecewaan rakyat Aceh bermula ketika presiden Sukarno membubarkan provinsi Aceh dan melikuidasinya kedalam wilayah Sumatra Utara. Kekecewaan rakyat Aceh tergambar dalam kongres Alim Ulama se Indonesia di Medan pada 21 April 1953.<sup>8</sup> Alasan Sukarno tidak representative terhadap keinginan rakyat Aceh cukup logis karena kekhawatiran jika disetujui pendirian negara Islam di Aceh, daerah lain akan memisahkan diri dari Republik Indonesia. Sukarno lebih memilih konsep negara nasionalis yang dianggap bisa menyatukan semua unsur etnis, suku, golongan dan agama yang ada di daerah Republik Indonesia.

Menurut Daud Beureueh konflik pemerintah pusat dengan Aceh disebabkan karena perbedaan konsep negara antara Sukarno dengan rakyat Aceh. Rakyat Aceh menghendaki sistem negara berasaskan agama Islam, sementara Sukarno menghendaki konsep negara nasionalisme. Sebenarnya jika dari awal Sukarno mau meninjau kembali dan memperbaiki dasar-dasar negara, menata kebijakan dan menggerakkan pembangunan daerah konflik ini tidak akan berkembang dan meruncing.

Perlu kita ketahui bahwa masa awal kemerdekaan Indonesia, Sukarno sebagai pemimpin sebuah negara yang baru merdeka masih memiliki masalah yang jauh lebih penting yaitu pengakuan kedaulatan Republik Indonesia. Konsolidasi dari tokoh-tokoh negarawan sangat penting dilakukan, sehingga upaya penyelesaian konflik daerah masih terabaikan terutama konflik Aceh. Hal ini tidak berarti Sukarno melupakan permasalahan di Aceh. Dalam perjalanannya Sukarno juga melakukan diplomasi untuk menemukan penyelesaian konflik, meskipun ada tekanan militer dari pemerintahan Sukarno.

Konsep yang ditawarkan oleh Daud Beureueh untuk Aceh adalah Negara Islam Indonesia yang merupakan sebuah provinsi dengan otonomi yang luas. Akhirnya Daud Beureueh melakukan perlawanan terhadap pemerintah karena adanya tekanan

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 9.

militer dari pemerintah Republik Indonesia. DI/TII dibangun sebagai wadah kekuatan masyarakat Aceh.

Tanggal 27 Januari 1957, Menteri Dalam Negeri melantik tokoh ulama Aceh sebagai Gubernur di Aceh. Sikapa lunak yang ditunjukkan oleh Sukarno juga terlihat dari pemberian janji status daerah istimewa untuk Aceh. Aksi-aksi pemberontakan di Aceh mulai bisa ditumpas oleh Sukarno, hal tersebut disebabkan faktor interen ketidak harmonisan dalam tubuh DI/TII dan PRRI.

### **3. Dinamika Konflik dan Perdamaian Masyarakat Aceh Masa Orde Baru dan Reformasi**

Konflik yang terjadi di Aceh sudah terjadi sejak zaman sebelum pra kolonial, yaitu abad ke 17. Beberapa bentuk penyelesaian telah ditempuh antara pemerintah pusat dengan masyarakat Aceh namun masih sering mengalami kegagalan. Konflik yang terjadi di Aceh bukan hanya konflik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah Aceh. Konflik antara golongan juga memberikan ketegangan di wilayah Aceh. Antara golongan Islam dan sekuler memiliki pandangan berbeda terkait sistem pemerintahan di Aceh, sehingga diantara keduanya sering terjadi perang saudara.

Terjadinya pro dan kontra tokoh-tokoh Aceh ketika Indonesia merdeka terkait dengan bergabung atau tidaknya daerah Aceh ke dalam negara RI. Ada salah satu keturunan uleebalang yang menentang pemuda Aceh mengibarkan bendera merah putih. Sebelumnya para uleebalang tidak menginginkan Aceh merdeka dibawah pemerintahan Sukarno-Hatta.<sup>9</sup> Perang Cumbok yang berhasil diatasi menjelang akhir 1946 menandai berakhirnya sejarah panjang feodalisme uleebalang di Aceh.<sup>10</sup> Perang Cumbok merupakan perang antara uleebalang dan ulama yang disebut juga perang saudara terbesar. Jika dicermati ada korelasi antara uleebalang Cumbok dengan GAM dilihat dari geografis perjuangannya, meskipun belum ada pembuktian keturunan Daud Cumbok atau para uleebalang lain dengan ikut dalam perjuangan GAM.

Para pejuang Aceh semakin kecewa dengan tindakan Sukarno, dimana pada bulan Maret 1955 terjadi pembunuhan massal 64 orang yang tidak bersalah di kampung

---

<sup>9</sup> Neta S. Pane. 2001. *Sejarah dan Kekuatan Gerakan Aceh Merdeka*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm. 3.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

Cot Jeumpa di tembaki hingga tewas.<sup>11</sup> Alasan pemerintah Sukarno melakukan penembakan masal tersebut karena menganggap mereka adalah orang-orang DI/TII. Aksi pembantaian tersebut juga mengecewakan simpatisan Sukarno. Rakyat Aceh menjadi semakin kuat terutama setelah membentuk Kabinet Negara Bagian Aceh dan membentuk pertahanan militer.

Pada era Orde Baru pemerintah Suharno melakukan upaya penyelesaian konflik melalui pendekatan militer. Penetapan wilayah Aceh sebagai DOM (Daerah Operasi Militer) pada tahun 1989-1998 banyak menimbulkan korban sipil dan pelanggaran HAM.

Masa Orde Baru dibawah pemerintahan Suharto, Aceh dijadikan wilayah eksploitasi gas alam dan minyak bumi melalui proyek-proyek multirasional di era 1970-an. Eksploitasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat tidak dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan untuk masyarakat Aceh. Sehingga kemiskinan di wilayah Aceh sudah tidak terelakan lagi. Pemilu 1971 yang menjadikan Suharto rakus terhadap sumber daya alam di Aceh, karena Suharto merasa mendapatkan legitimasi kemenangan Golkar secara mutlak.

Keadaan yang terjadi pada pemerintahan Suharto malah semakin buruk, dimana industri-industri yang strategis semakin gencar didirikan di wilayah Aceh. Anehnya tidak ada kejelasan manfaat bagi rakyat Aceh, tidak ada kesejahteraan dan pembangunan yang berarti untuk rakyat Aceh. Industri yang dibangun di Aceh semakin lama semakin menggerogoti sumber daya alam.

Selain itu ada perasaan kecewa dari pemerintah Aceh karena kebanyakan yang duduk dalam pemerintahan adalah orang-orang Jawa atau sering disebut dengan koloniasasi Jawa. Perlu kita ingat bahwa pada masa pemerintahan Orde Baru wilayah Aceh ditetapkan sebagai DOM (Daerah Operasi Militer) yang bertujuan supaya pembangunan tidak mengalami gangguan karena tentangan dari masyarakat Aceh.

GAM dibentuk tahun 1975 dengan tujuan untuk menuntut kemerdekaan Aceh. Hasan Tiro ditunjuk sebagai pemimpin GAM (Gerakan Aceh Merdeka). Sebelumnya Hasan Tiro berada di luar negeri (diaspora) yang pulang tahun 1975. Hasan Tiro aktif menggalang kekuatan dari tokoh-tokoh muda dan tokoh intelektual Aceh supaya memberikan dukungan penuh terhadap GAM. Tuntutan yang suarakan para

---

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm. 16.

ceh yang menyertai pelabuhan Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA). SIRA yang didirikan di Aceh pada 4 Februari 1999 berusaha merealisasikan keinginan rakyat Aceh untuk menentukan nasibnya sendiri.

Ada narasi lain terkait pemberontakan GAM, Hasan Tiro pernah mengalami kegagalan dalam tander dengan perusahaan kontruksi Amerika Serikat.<sup>12</sup> Kekecewaan dari Hasan Tiro tidak dapat terelakan lagi setelah pemerintah Indonesia masa Orde Baru melakukan eksploitasi minyak dan gas alam di Aceh. Hasan Tiro juga menuduh orang-orang Jawa sebagai pelaku neokolonial yang akan merebut harta kekayaan masyarakat Aceh. Jelas sudah dapat kita pahami bahwa motif pemberontakan GAM adalah faktor ekonomi.

Pada rentang tahun 1999-2004 kondisi politik dan sosial Aceh mengalami perubahan yang sangat cepat. Pasca Orde Baru hingga sekarang Aceh mendapatkan payung hukum mulai dari UU No. 44 tahun 1999 tentang keistimewaan Aceh, UU No. 18 tahun 2001 tentang otonomi daerah (pelaksanaan syariat islam), UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU No. 11 tentang pemerintahan Aceh.

Masa Orde Baru lengser dan digantikan Abdul Rahman Wahid sebagai presiden Republik Indonesia. Gusdur mencoba meredakan konflik yang ada di Aceh dengan melakukan Jeda Kemanusiaan dan menghentikan DOM yang terus menerus melanggar HAM. Pada awalnya Jeda Kemanusiaan yang ditempuh pemerintah dalam menanggulangi konflik Aceh berjalan dengan baik, tetapi tidak berlangsung lama. Akhirnya Megawati membuat suatu keputusan dengan pemberlakuan kembali Aceh sebagai DOM, dimana pasukan ABRI kembali diterjunkan ke Aceh. Suasana yang terjadi di Aceh menjadi semakin keruh. Sampai akhirnya pemerintahan Republik Indonesia dipegang oleh Susilo Bambang Yudhoyono, upaya penyelesaian konflik lebih dipilih dengan jalan damai.

#### **4. Memahami Resolusi Konflik di Aceh dalam Perspektif Historis**

Beberapa resolusi penyelesaian konflik yang telah dilakukan antara pemerintah Pusat dengan Aceh cenderung menemui kegagalan. Upaya penyelesaian konflik telah dilakukan dengan jalur militer dan jalur perundingan. Pada masa Orde Baru ditempuh upaya penyelesaian konflik melalui jalur militer, Aceh ditetapkan sebagai DOM

---

<sup>12</sup> Antje Missbach, *Politik Jarak Diaspora Aceh: Suatu Gambar tentang Konflik Sparatis di Indonesia*. 2012. Yogyakarta: Ombak, hlm. xvii.

(Daerah Operasi Militer). Dengan ditetapkannya Aceh menjadi DOM menjadikan suasana semakin tegang karena terjadi berbagai pelanggaran HAM.

Berbeda dari masa Orde Baru, masa Revolusi melakukan dialog politik untuk mencari penyelesaian konflik Aceh. Penetapan Aceh sebagai DOM telah dicabut dan ada permintaan maaf dari perilaku TNI yang dianggap sering melakukan pelanggaran HAM selama berada diwilayah Aceh oleh Panglima ABRI Jendral Wiranto. (Djumaata, 2013, hlm. 38).

Menurut Miall *et al* (2000), bahwa dalam penyelesaian konflik penting untuk melibatkan pihak ketiga dengan alasan; (1) interdependensi global yang ada mengakibatkan perlunya pihak ketiga turun campur tangan sebagai pencegahan agar konflik tidak meluas kenegaraannya; (2) sumber-sumber konflik justru lebih banyak dari faktor luar; (3) adanya kesepakatan dari hampir semua kajian konflik bahwa konflik yang berlarut-larut hanya dapat diselesaikan dengan melibatkan pihak luar; (4) biaya konflik berupa tragedi kemanusiaan membuat pihak luar memiliki legitimasi untuk tidak tinggal diam atau melakukan intervensi.<sup>13</sup>

Usaha yang dilakukan untuk membangun perdamaian di Aceh dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yaitu NGO Internasional. Kesimpulan dalam rekonsiliasi di Aceh selanjutnya bermuara pada pemahaman lanjut tentang etnik dan agama, sistem syariah yang kompatibel dengan nilai universal, identitas, harapan bisnis masa depan, pendidikan, peranan militer serta prinsip demokratis yang membuka lembaran baru Aceh dengan motor generasi barunya.<sup>14</sup>

*Hendry Dunant Centre* yang merupakan lembaga non pemerintahan dipilih sebagai mediator untuk perundingan antara pemerintah pusat dengan GAM (Gerakan Aceh Merdeka). Peran HDC semakin terlihat pada masa pemerintahan Abdul Rahman Wahid dan Megawati Sukarnoputri. Namun HDC gagal menjalankan perannya sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik Aceh dengan pemerintah pusat.

CMI (masa presiden SBY-JK) di Helsinki menjadi mediator setelah gagalnya HDC sebagai mediator perdamaian Aceh dengan pemerintah pusat. CMI melakukan negosiasi dengan pemerintah SBY dan GAM yang berisikan kesepakatan MoU.

---

<sup>13</sup>Dikutip dari, Muhammad Iqbal. Fenomena Kekerasan Politik di Aceh Pasca Perjanjian Helsinki. *Jurnal Hubungan Internasional*, tahun VII. No. 2, Juli-Desember 2014.

<sup>14</sup>Laporan Zulkarnain Jalil dalam, Bungong Jaroe. *Kontras*, tahun IX. No. 380. 12-18 April, hlm 23.



Ditandatangani nota kesepakatan MoU merupakan langkah awal meredanya konflik antara GAM dengan pemerintah Indonesia.

CMI dan NGO internasional yang bertempat di Helsinki ditunjuk sebagai mediator penyelesaian konflik Aceh. Sebelumnya HDC yang ditunjuk sebagai mediator tidak dapat menemukan solusi penyelesaian konflik. Sebagai mediator berikutnya ditunjuklah CMI sebagai mediator yang berhasil menyelesaikan konflik antara GAM dan pemerintah Republik Indonesia. Perundingan perjanjian ini dilakukan melalui lima tahap yaitu: (1) pembicaraan tentang otonomi khusus, (2) pembicaraan anastesi dengan segala prosesnya, (3) pengaturan keamanan, (4) sistem mentoring pengaturan keamanan, (5) pembicaraan tentang tahapan-tahapan pencapaian dan waktu yang jelas.<sup>15</sup>

## **5. Temuan-temuan Terkait Dinamika Konflik dan Perdamaian serta Opsi Penyelesaian Konflik Aceh**

Telah banyak dilakukan usaha untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di wilayah Aceh, khususnya konflik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah Aceh. Pada masa DI/TII Aceh menginginkan otonomi dari pemerintah pusat untuk menerapkan syariat Islam. Namun kenyataannya hal tersebut tidak dipenuhi oleh pemerintah pusat, meskipun sebelumnya Sukarno telah menyetujui permintaan tersebut.

Bagaimana akar permasalahan yang mengakibatkan konflik terjadi perlu dilihat kembali untuk dapat menemukan sebuah penyelesaian. Kekecewaan yang terjadi dalam suatu wilayah atau daerah terhadap pemerintah pusat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:

1. Ketidak puasaan akan kinerja pemerintah maka muncullah ide-ide untuk membentuk suatu gerakan yang memiliki misi dan visi yang berkaitan dalam menyaingi keadaan yang sudah ada dalam birokrasi dan tatanan yang sudah ada sebelumnya.
2. Kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya yang dalam pemikiran sejumlah kelompok tidak wajar, maka cenderung bebas dan keluar dari aturan itu dan memilih memberontak dari kebijakan yang ada dan ingin merdeka dengan caranya sendiri.

---

<sup>15</sup> Muhammad Iqbal., *Opcit.*

3. Pemahaman terhadap keyakinan dan ini cenderung mengarah pada paham sparatisme dan merusak tatanan nilai dan moral yang ada, serta dapat menimbulkan perpecahan.<sup>16</sup>

Dari kutipan di atas dapat kita pahami bagaimana sebenarnya konflik yang terjadi di Aceh sejak Indonesia merdeka. Kekecewaan masyarakat Aceh kepada pemerintah pusat yang tidak memberikan otonomi daerah dan eksploitasi yang dilakukan masa Orde Baru. Kekecewaan masyarakat Aceh terhadap pemerintah pusat akhirnya menimbulkan pemberontakan dengan dibentuknya GAM (Gerakan Aceh Merdeka) yang menentang pemerintah pusat dan ingin mendirikan negara Aceh yang merdeka sesuai dengan syariat Islam.

Sejak kemunculan GAM, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan konflik. Pemerintah sudah berusaha menyelesaikan konflik Aceh secara internal, namun penyelesaian dengan jalan damai sulit untuk menemukan kesepakatan. Sehingga pihak ketiga perlu ditempuh sebagai mediator dalam penyelesaian konflik.

Salah satu usaha yang dilakukan untuk menemukan perdamaian di wilayah Aceh adalah dengan melibatkan NGO internasional sebagai mediator. Meskipun usaha yang ditempuh dengan mendatangkan pihak ketiga sebagai mediator, namun masih dijumpai kesenjangan antara pihak yang bertikai. Kedua pihak belum sepaham dalam melaksanakan perjanjian yang semestinya harus mereka lakukan.

Upaya penyelesaian konflik dilakukan dengan pemberian otonomi daerah dan otomi politik kepada daerah istimewa Aceh. Pemerintah sudah memberikan keistimewaan kepada daerah Aceh, jika tidak diberikan suatu wewenang untuk mengurus daerahnya sama saja nama daerah istimewa tersebut hanya sebuah label. Seperti halnya Yogyakarta yang diberikan wewenang untuk mengatur wilayahnya sendiri dengan otonominya sendiri. Sepertinya dengan syariat Islam yang didirikan di Aceh akan menghentikan konflik yang berkepanjangan antara pemerintah pusat dengan tokoh-tokoh di Aceh. Aceh boleh menjalankan otonomi daerahnya dengan syariat Islam bukan berarti mereka berada dalam negara Islam sendiri, namun masih menjadi kesatuan negara Indonesia.

Untuk melindungi wilayah Aceh dari ancaman negara luar karena tergiur dengan sumber daya alam pemerintah Indonesia harus memberikan perlindungan.

---

<sup>16</sup> Murdi, 2011, hlm. 1

Jadi meskipun wilayah Aceh menerapkan pemerintahan dengan otonomi dan syariat Islamnya, pemerintah harus tetap memantau dan memberikan perlindungan terhadap Aceh dari negara luar yang ingin menggeruk sumber kekayaan alam. Selain itu pemerintah pusat tidak boleh sembarangan mengizinkan investor asing datang ke Aceh jika tidak menguntungkan bagi pihak Aceh dan pemerintah pusat.

Lahirnya konsep desentralisasi oleh pemerintah, Aceh menjadi salah satu wilayah diuntungkan. Terbukti semenjak tahun 1999 penerimaan daerah yang dikelola oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, meningkat dari Rp. 2,4 triliun mencapai Rp. 11,2 triliun pada tahun 2006. Pengalihan wewenang tahun 2001 dengan pemberlakuan otonomi khusus di tahun 2002 dan peningkatan dana alokasi umum.<sup>17</sup> Gencarnya pembangunan yang dilakukan diwilayah Aceh semakin menyempitkan kekecewaan rakyat Aceh terhadap pemerintah pusat.

## **6. Kesimpulan**

Konflik yang terjadi di Aceh sebenarnya sudah ada sejak zaman pra-kolonial. Konflik yang terjadi terutama konflik internal antara golongan ulama dan uleebalang. Golongan ulama ingin menerapkan syariat Islam sebagai landasan pemerintahan di Aceh, tetapi kaum uleebalang yang berpandangan sekuler tidak menyetujuinya. Konflik internal Aceh ini terjadi selama bertahun-tahun dan mengakibatkan perang saudara.

Aceh juga memiliki konflik dengan pemerintah pusat karena merasa porsinya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Setelah Indonesia merdeka rakyat Aceh menginginkan Islam sebagai landasan negara, tetapi Sukarno lebih memilih nasionalisme. Ketika pemerintahan Suharto yang otoriter dan gencar melakukan pembangunan, sumber daya Aceh banyak yang di eksploitasi. Rakyat Aceh kecewa karena pemerintah pusat tidak memikirkan kesejahteraan rakyat Aceh. Aceh digunakan sebagai ladang sapi perah yang terus dikeruk kekayaannya, sehingga rakyat menentang pemerintah pusat dengan membentuk GAM (Gerakan Aceh Merdeka).

Konflik yang terjadi antara GAM dan pemerintah pusat sudah diupayakan penyelesaiannya. Dengan militer dan dengan dialog perundingan. Tetapi tidak mudah menemukan kesepakatan perdamaian. Sekarang ketika presiden Jokowi-JK

---

<sup>17</sup> Kompasiana. *Op cit.*

memerintah, Aceh mulai dibenahi dan mulai dibangun, kekecewaan rakyat karena kemiskinan mulai berkurang. Selain itu Aceh sudah bisa menerapkan otonomi daerah sesuai yang mereka inginkan.

### References

- Anthony Reid. 2007. *Asal Mula Konflik Aceh*. Jakarta: Obor
- Antje Missbach. 2012. *Politik Jarak Diaspora Aceh: Suatu Gambar Tentang Konflik Sparatis di Indonesia*. Yogyakarta: Ombak.
- MR. S.M. Amin. 2014. *Memahami Sejarah Konflik Aceh*. Jakarta: Obor.
- Muhammad Iqbal. Fenomena Kekerasan Politik di Aceh Pasca Perjanjian Helsinki. *Jurnal Hubungan Internasional*, tahun VII. No. 2, Juli-Desember 2014.
- Neta S. Pane. 2001. *Sejarah dan Kekuatan Gerakan Aceh Merdeka*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Bumgong Jaroe. *Kontras*, tahun IX. No. 380. 12-18 April.
- <http://m.kompaasiana.com/dewis/aceh-di-masa-lalu-hingga-masa-kini>  
5510b63ba333117732ba8d1d, (Diakses 3 Mei 2016, pukul 10.23 WIB)